PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KPK Bidik Dua Kasus Korupsi di Kalbar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memelototi penanganan dua kasus dugaan korupsi di Kalimantan Barat (Kalbar). Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu membantu Kepolisian Daerah Kalbar dalam menangani dua kasus dugaan korupsi. Dua kasus itu adalah dugaan korupsi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi. Dana pembangunan itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012-2015 sebesar Rp13 miliar.

FEBRI DIANSYAH

Kemudian, kasus dugaan korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

◆Ke Halaman 7 kolom 1

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KPK Bidik Dua Kasus Korupsi di Kalbar

Sambungan dari halaman 1

Bengkayang kepada kepala desa di wilayah setempat. Dana itu bersumber dari APBD Bengkayang tahun anggaran 2017 sebesar Rp20 miliar.

Kemarin (19/6), komisi antirasuah itu menggelar rapat koordinasi bersama penyidik Polda Kalbar serta Bareskrim Polri, dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk membahas penanganan dua kasus dugaan korupsi tersebut.

"Untuk kasus pembangunan Masjid Agung Melawi, penyidikan telah dilakukan sejak 2016, sedangkan kasus dana bantuan khusus desa di Kabupaten Bengkayang telah dilakukan penyidikan sejak 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (19/6).

Rakor itu dihadiri Tim Satgas Penindakan Koordinasi Wilayah IV KPK, Kepala Sub Direktorat III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Polisi Prasetyo Adhi Wibowo, serta dari Bareskrim AKBP Sumarni dan AKBP Sugiyanto, dan tim auditor BPK. Menurut Febri, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi yang dilakukan pada 20 Februari 2019 di Mapolda Kalbar.

Sebagaimana amanat undang-undang, kata Febri, maka dalam menjalankan fungsi trigger mechanism, KPK memfasilitasi pertemuan penyidik dan auditor BPK. KPK juga mendukung menghadirkan ahli serta dukungan lain yang dibutuhkan oleh tim. Koordinasi dan supervisi ini dilakukan agar hambatan-hambatan yang terjadi dapat diselesaikan sehingga penanganan perkara bisa masuk ke tahap berikutnya. Saat ini, ujar dia, proses penanganan perkara masih tahap penyidikan, mengumpulkan alat bukti serta proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK RI.

"Penetapan tersangka akan dilakukan setelah sejumlah tahapan ini selesai dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," ungkap Febri. ***(ody)***